

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 3 TAHUN 2019

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI KEDEPUTIAN BIDANG HUKUM DAN  
PENYELESAIAN SANGGAH TAHUN 2019

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Mandiri di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan penyusunan Tim Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Tahun 2019.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Reformasi Birokrasi Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Keputusan Kepala LKPP Nomor 58 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015-2019; dan
7. Surat Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/70/PW.00/2019 tanggal 18 April 2019 Hal Penyampaian PMPRB dan Pengajuan Unit Kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI KEDEPUTIAN BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Kedepatian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pad diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyusun rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kedepatian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah;
- b. Melaksanakan penginputan nilai Reformasi Birokrasi Unit Kerja Kedepatian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah pada aplikasi PMPRB Unit Kerja Eselon I/ Unit Kerja Mandiri; dan
- c. Mengumpulkan bukti dukung atas pelaksanaan rencana aksi dan penilaian Reformasi Birokrasi Kedepatian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Eselon II Mandiri di LKPP dan melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember Tahun 2019.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Mei 2019

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian  
Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan  
Barang/Jasa Pemerintah,

ttd

Ikak Gayuh Patriastomo

Tembusan:

1. Kepala LKPP
2. Sekretaris Utama

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEPUTI  
BIDANG HUKUM DAN  
PENYELESAIAN SANGGAH  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2019  
TANGGAL 3 MEI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI KEDEPUTIAN BIDANG HUKUM  
DAN PENYELESAIAN SANGGAH TAHUN 2019

No	Kedudukan dalam tim	Nama
1.	Pengarah	: Ikak Gayuh Patriastomo
2.	Ketua	: Yulianto Prihhandoyo
3.	Anggota	: 1. Muhammad Aris Supriyanto 2. Setya Budi Arijanta 3. Dian Arsita Wardhani 4. Eben Henry Reagen 5. Inamawati Mastuti Dewi 6. Anas Bayu Kusuma 7. Astri Erviana 8. Muhamad Taufikurrohman